

ABSTRAK

Pengejawantahan sistem demokrasi telah diimplementasikan melalui reformasi elektoral dalam demokratisasi pemerintahan Indonesia dengan melakukan perubahan yang cukup radikal dari sistem pemilihan tidak langsung (perwakilan) menjadi pemilihan langsung baik presiden dan wakil presiden, pasangan kepala daerah dan anggota legislatif. Untuk menghindari dampak buruk pemilihan umum secara langsung, Pemerintah mengesahkan peraturan terkait dengan tindak pidana pada pemilihan umum.

Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang termuat dalam peraturan, serta contoh nyata dari tindak pidana tersebut dibahas dengan rinci dalam karya tulis ini dimana yang digunakan sebagai dasar adalah Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN-Pml. Pada putusan tersebut dicari sebuah inti yakni terkait nilai keadilan dan kemanfaatan atas putusan yang telah dibedah berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Penelitian terkait dengan permasalahan sebagaimana disebut di atas dibedah menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan mengkaji permasalahan menggunakan bahan-bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, teori, dan sebagainya.

Pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 bersifat *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terkait dengan subjek hukumnya, tidak terdapat perbedaan pengaturan dengan subjek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni hanya orang atau *naturlijk persoon* saja. Terkait dengan perbuatan yang dilarang, dicakup secara luas dan telah memenuhi kebutuhan dalam rangka pengaturan terkait dengan tindak pidana yang mungkin dapat terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Slamet dalam Putusan No. 45/Pid. Sus/2015/PN.Pml melakukan perbuatan berupa melakukan kampanye dengan memanfaatkan kegiatan sosialisasi PKH, yang didanai dengan menggunakan anggaran Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan di Balai Desa Bongas Kecamatan Watukumpul. Pada persidangan dibuktikan bahwasanya Slamet bukan merupakan tim sukses dan relawan pasangan nomor urut dua yang terdaftar di KPUD Kabupaten Pematang Jaya.

Formulasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 perlu untuk dilakukan pembenahan, terutama terkait dengan penggunaan frasa “dan”, “atau”, dan “dan/atau”. Kesalahan penggunaan frasa dapat berakibat terhadap tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang maupun perbuatan. Perlu formulasi ulang terhadap pengaturan tersebut. Selain itu, hubungan antara seseorang dengan pasangan calon yang diuntungkan seharusnya tidak hanya dilihat dari formalitasnya saja, melainkan juga harus dilihat secara substantif sehingga dapat memberikan keadilan bagi kompetitor pasangan calon yang diuntungkan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemilukada

ABSTRACT

The embodiment of democratic system has been implemented through electoral reform in the democratization of the Indonesian government by making quite radical changes from the indirect (representative) electoral system to the direct election of both the president and vice president, the pair of regional heads and legislative members. To avoid the adverse effects of direct elections, the Government passed regulations related to criminal acts in general elections. What forms of criminal acts during the implementation of regional head elections contained in the regulations, as well as concrete examples of these crimes are discussed in detail in this paper where the basis used is Decision No. 45 / Pid.Sus / 2015 / PN-Pml. In this ruling, a core is sought, which is related to the value of justice and usefulness of decisions that have been dissected based on positive law in Indonesia.

The research related to the problems mentioned above was dissected using normative juridical methods, by examining the problems of using primary legal materials, legislation, theory, and so on.

*Regulation of criminal provisions in Law No. 1 of 2015 is *lex specialis* from the Criminal Code. Regarding the legal subject, there is no difference in the arrangement with the legal subject in the Criminal Code, that is only person. In relation to prohibited acts, it is broadly covered and has fulfilled the needs in the framework of regulations related to criminal acts that may occur in the Election of Regional Heads.*

Slamet in Decision No. 45 / Pid. Sus / 2015 / PN.Pml carried out acts in the form of campaigning by utilizing PKH socialization activities, which were funded using Regional Government budgets, which were carried out at Bongas Village Hall, Watukumpul District. At the trial it was proven that Slamet was not a successful team and volunteer of number two pair registered in KPUD Pematang Regency.

Formulation of criminal provisions in Law No. 1 of 2015 needs improvement, especially related to the use of phrases "and", "or", and "and / or". Erroneous use of phrases can result in neither the person nor the act being held accountable. Need to reformulate the arrangement. In addition, the relationship between a person and a candidate pair that is benefited should not only be seen from the formalities, but also must be viewed substantively so that it can provide justice for the competing candidates.

Key words: Criminal, Pemilu